

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM KERANGKA MEMBANGUN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Dodi Hidayat¹⁾

Hendarin²⁾

^{1,2)}Dosen Politeknik TEDC Bandung

E-mail:

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat desa, harus dikembangkan sesuai dengan kesadaran dan bentuk konstruk budaya dan sistem ekologi yang ada, agar dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat itu sendiri, dan pada akhirnya akan membantu masyarakat untuk menyadarkan dirinya sendiri bahwa kerangka pembangunan itu, bermuara pada model membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci : pemberdayaan masyarakat desa, NKRI

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya masih tinggal di kawasan pedesaan, pedalaman atau daerah terdepan. Terutama mereka yang masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perkebunan dan berbagai mata pencaharian lain yang masih berhubungan dengan pemanfaatan alam secara penuh. Secara komposisi struktur mata pencaharian masyarakat Indonesia secara keseluruhan, pertanian masih memegang peranan yang cukup penting, dengan 34% total penduduk Indonesia memilih pertanian sebagai mata pencaharian. Sedangkan perdagangan menyumbangkan 31%, sektor jasa 13%, sektor industri 11% dan sisanya adalah mata pencaharian bidang perbankan, pertambangan dan sebagainya. Dengan demikian, pertanian masih sangat banyak memberikan kontribusi terhadap tingkat kehidupan masyarakat Indonesia, ditambah dengan tingginya konsumsi pada produk pertanian berupa beras yang demikian tinggi, yakni mencapai 130 kilogram perkapita pertahun[1]. Sehingga wajar bila pada tahun 1999 masih terdapat sekitar 72% penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perkebunan, dan pada tahun 2007 jumlah ini menyusut menjadi tinggal 61,7% saja penduduk

yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian [2]. Ini tentu menjadi catatan tersendiri, dimana telah terjadi pergeseran yang cukup signifikan walaupun hanya dalam tempo enam tahun saja, telah menggeser sekitar 10,3% komposisi struktur mata pencaharian yang ada di kawasan pedesaan. Inilah yang menjadi fokus utama pembangunan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang, dimana pembangunan perkotaan dan pedesaan, seolah masih terjadi sesuai dengan kebutuhan faktual, dan bukan pada visi pembangunan jangka panjang yang jauh lebih maju.

Pemberdayaan masyarakat pedesaan memberikan serangkaian pemikiran dan konsep yang beragam mengenai bagaimana bentuk pemberdayaan yang sesuai dengan karakter budaya, karakter kehidupan masyarakat, serta karakter berbagai unsur penunjang kehidupan yang ada, baik berupa hayati maupun nonhayati. Karena, kaitan ekologis dengan prinsip pengembangan pembangunan menjadi demikian penting. Kita tentu masih ingat, ketika bantuan traktor dari Presiden Soeharto kepada masyarakat Baduy dalam justru ditolak. Alasan dasarnya adalah budaya yang tidak siap, padahal dalam komponen utamanya hal ini bukan merupakan alasan budaya semata, melainkan merupakan rangkaian dari kesadaran ekologis yang masih dimiliki oleh

masyarakat Baduy itu sendiri, dimana mereka tidak pernah menggunakan peralatan kosmetik atau alat mandi sebagaimana yang digunakan oleh masyarakat daerah lain yang merasa telah mencapai derajat modernisasi tersendiri, dengan catatan hal tersebut justru mengganggu keseimbangan ekologi tempat mereka hidup. Inilah yang kemudian mendorong Brundtland (1988) menyatakan bahwa strategi dan pendekatan pembangunan pedesaan dan perkotaan harus saling melengkapi dan tidak saling bertentangan.

Pemberdayaan masyarakat pedesaan, terutama di daerah 3T (terpencil, terdepan dan tertinggal) menjadi perhatian utama dalam pembangunan Indonesia saat ini. Kita tentu masih ingat bagaimana Pulau Sipadan dan Ligitan bisa lepas dari genggaman ibu pertiwi adalah, karena Malaysia sudah lebih dulu membangun dan mengembangkan kedua pulau tersebut daripada yang pernah dilakukan Indonesia untuk kedua pulau tersebut. Inilah yang kemudian menjadi dasar utama keputusan Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa kedua negara mengenai batas negara dan kepemilikan atas dua pulau tersebut. Selain itu, kita juga tentu ingat bagaimana Gerakan Aceh Merdeka telah melakukan lebih dari 30 tahun perlawanan terhadap negara Indonesia, karena beranggapan bahwa Jakarta tidak pernah bisa memahami kesulitan yang ada di daerah-daerah lain. Kita juga tentu masih ingat bagaimana Operasi Papua Merdeka merangsek untuk melakukan perlawanan, karena merasa diperlakukan tidak adil. Daerah mereka yang kaya raya tidak pernah mampu membuat kehidupan mereka bergerak jauh lebih baik. Kini, Indonesia telah menyadari kekeliruan fokus pembangunan yang terlalu Jawasentris. Ini yang mendorong pemerintah untuk membangun sistem pembangunan yang jauh lebih merata untuk semua daerah di Indonesia, terutama daerah yang selama ini dikategorikan sebagai daerah terpencil (pedalaman) yang sulit untuk mendapatkan akses sama sekali, tertinggal (belum mampu untuk mensejajarkan diri dengan daerah-daerah lainnya) dan terluar yang langsung berhadapan dengan kehidupan negara-negara tetangga yang jauh lebih maju.

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati untuk membangun Indonesia yang maju di masa yang akan datang. Tanpa adanya kerangka kesatuan negara Republik Indonesia, hanya akan membuat pembangunan yang dilakukan terbuang sia-sia, walaupun dana

telah digelontorkan cukup besar, tapi akan berarti apapun dalam membangun makna kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh. Inilah yang kemudian bahwa semua pihak harus menyadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan sebuah visi pembangunan yang jauh lebih terbuka dan lebih mampu untuk merangkul semua pihak yang terkait di dalamnya. Tantangan mengenai NKRI ini sendiri tidak selamanya berasal dari luar, tapi justru dari dalam negara Indonesia itu sendiri. Termasuk dari masalah adanya perasaan ketidakadilan dalam pembangunan. Ini menjadi bagian penting dalam upaya membangun Indonesia yang lebih maju di masa yang akan datang. Apalagi, Indonesia memiliki hampir 250 etnis yang tersebar di berbagai daerah dan melintasi batas geografis yang belum bisa dimaksimalkan hingga saat ini. Bila tidak segera ditangani secara bijak, maka sangat mungkin bibit-bibit disintegrasi bangsa akan terus muncul dan menjadi ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Inilah, yang menjadi kunci utama, mengenai bagaimana memberdayakan masyarakat pedesaan agar dapat mendukung terbangunnya sebuah sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang benar-benar utuh dan saling melengkapi satu sama lain, dan bukan membiarkan bangsa asing masuk kemudian menyebabkan tumbuhnya rasa ketidakadilan diantara sesama anak bangsa yang dibesarkan di Indonesia.

Tujuan penelitian

1. Mengetahui kondisi pembangunan masyarakat di daerah pedesaan sebagai salah satu cara untuk menemukan pemetaan masalah dasar pembangunan masyarakat di daerah pedesaan, terutama di daerah 3T (terluar, terpencil dan tertinggal).
2. Mengembangkan konsep alternatif pemecahan masalah untuk membangun daerah-daerah yang terkategori sebagai daerah 3T dan perannya dalam membangun sebuah konsep menyeluruh tentang membangun NKRI di masa yang akan datang.

Perumusan masalah

1. Bagaimana pendekatan yang bisa dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat?
2. Bagaimana pembangunan daerah pedesaan dapat memberikan kontribusi terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Landasan teori

Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat telah mengambil bagian yang

sangat penting dalam membangun dan mengembangkan berbagai konsep mengenai kerangka teori kesejahteraan masyarakat. Banyak hal yang bisa dikembangkan bilamana masyarakat telah mampu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupannya, secara kualitas maupun kuantitas. Pergumulan berbagai teori pembangunan ekonomi mengenai pengentasan kemiskinan seringkali menjadi penyebab adanya berbagai pertentangan dalam kajian ekonomi dan kehidupan bermasyarakat, bahkan pertentangan ideologis antara berbagai kelompok dan negara-negara di dunia juga berkembang dari asal muasal pertanyaan tentang meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh tanpa membedakan strata sosial.

Kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Presiden Soekarno, kala itu adalah untuk membangun dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia, dari situasi dan kondisi yang karut marut menuju masyarakat yang makmur berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang secara implisit bahkan eksplisit bahwa pembangunan masyarakat yang menyeluruh inilah yang kemudian menjadi bagian penting dalam membangun dan mengembangkan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian-bagian penting dalam pembangunan itu sendiri adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan haknya sebagai manusia agar dapat mengembangkan dirinya dan masyarakatnya sesuai dengan tujuan dan cita-cita kehidupan itu sendiri, tanpa membedakan antara yang satu dengan lainnya.

Kemakmuran dan keadilan adalah sebuah cita-cita mulia untuk membangun sebuah kerangka negara yang madani. Begitupun dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuatan militer dan politik mercusuar tidak akan pernah mampu untuk membuat negara ini disegani. Keduanya hanya pendukung sebagai salah satu tulang rusuk pembangunan, sedangkan kekuatannya sendiri adalah berasal dari kemampuan negara tersebut untuk dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya secara swadaya, bukan hanya mengandalkan bantuan asing dan membiarkan penjajah-penjajah ekonomi berkedok investor mengombang-ambing kepentingan dan suara masyarakat untuk mendapatkan keuntungan materiil yang tidak berdampak secara langsung terhadap peningkatan kualitas kehidupan

masyarakat bahkan dalam cakupan lokal sekalipun.

a. Pemberdayaan dan Kualitas Kehidupan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat biasa dipahami atau diartikan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Ada pula pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengarahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.

Ada beberapa cara pandang yang dapat digunakan dalam memahami pemberdayaan masyarakat (Sutoro Eko, 2004) yaitu:

1)Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas(kewajiban)negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

2)Pemberdayaan secara prinsipil berurusan dengan upaya memenuhi kebutuhan (needs) masyarakat. Banyak orang berargumen bahwa masyarakat akar rumput sebenarnya tidak membutuhkan hal-hal yang utopis (ngayawara) seperti demokrasi, desentralisasi, good governance, otonomi daerah, masyarakat sipil dan seterusnya. "Apa betul masyarakat desa butuh demokrasi dan otonomi desa? Masyarakat itu hanya butuh pemenuhan sandang, pangan dan papan. Ini yang paling dasar. Tidak ada gunanya bicara demokrasi kalau rakyat masih miskin. Pendapat ini masuk akal, tetapi sangat dangkal. Mungkin kebutuhan pokok itu akan selesai kalau terdapat uang yang banyak. Tetapi persoalannya sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat itu sangat

langka (scarcity) dan terbatas (constrain). Masyarakat tidak mudah bisa akses pada sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Karena itu, pemberdayaan adalah sebuah upaya memenuhi kebutuhan scarcity dan constrain sumberdaya. Bagaimanapun juga berbagai sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bukan hanya terbatas dan langka, melainkan ada problem struktural (ketimpangan, eksploitasi, dominasi, hegemoni, dan lain-lain) yang menimbulkan pembagian sumberdaya secara tidak merata. Dari sisi negara, dibutuhkan kebijakan dan program yang memadai, canggi, pro-poor untuk mengelola sumberdaya yang terbatas itu. dari sisi masyarakat, seperti penulis elaborasi kemudian, membutuhkan partisipasi (voice, akses, ownership dan kontrol) dalam proses kebijakan dan pengelolaan sumberdaya.

3)Pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Dari sisi proses, masyarakat sebagai subyek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif mengembangkan potensi-kreasi, memperkuat posisi tawar, dan meraih kedaulatan. Dari sisi visi ideal, proses tersebut hendak mencapai suatu kondisi dimana masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian melakukan voice, akses dan kontrol terhadap lingkungan, komunitas, sumberdaya dan relasi sosial-politik dengan negara. Proses untuk mencapai visi ideal tersebut harus tumbuh dari bawah dan dari dalam masyarakat sendiri. Namun, masalahnya, dalam kondisi struktural yang timpang masyarakat sulit sekali membangun kekuatan dari dalam dan dari bawah, sehingga membutuhkan "intervensi" dari luar. Hadirnya pihak luar (pemerintah, LSM/ NGO's, organisasi masyarakat sipil, organisasi agama, perguruan tinggi, dan lain-lain) ke komunitas bukanlah mendikte, mengurui, atau menentukan, melainkan bertindak sebagai fasilitator (katalisator) yang memudahkan, menggerakkan, mengorganisir, menghubungkan, memberi uang, mendorong, membangkitkan dan seterusnya. hubungan antara komunitas dengan pihak luar itu bersifat setara, saling percaya, saling menghormati, terbuka, serta saling belajar untuk tumbuh berkembang secara bersama-sama.

4)Pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif. Pemberdayaan psikologis-personal berarti mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi,

dan kontrol diri individu. Pemberdayaan struktur-personal berarti membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial-politik yang timpang serta kapasitas individu untuk menganalisis lingkungan kehidupan yang mempengaruhi dirinya. pemberdayaan psikologis-masyarakat berarti menumbuhkan rasa memiliki, gotong royong, mutual trust, kemitraan, kebersamaan, solidaritas sosial dan visi kolektif masyarakat. Sedangkan pemberdayaan struktural-masyarakat berarti mengorganisir masyarakat untuk tindakan kolektif serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan. pemberdayaan tidak bisa hanya diletakkan pada kemampuan dan mental diri individu, tetapi harus diletakkan pada konteks relasi kekuasaan yang lebih besar, dimana setiap individu berada di dalamnya. mengikuti pendapat Margot Breton (1994), realitas obyektif pemberdayaan merujuk pada kondisi struktural yang mempengaruhi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumberdaya di dalam masyarakat. dia juga mengatakan bahwa realitas subyektif perubahan pada level individu (persepsi, kesadaran dan pencerahan), memang penting, tetapi sangat berbeda dengan hasil-hasil obyektif pemberdayaan: perubahan kondisi sosial.

5)Pemerintahan dan negara pada intinya hendak membawa negara lebih dekat ke masyarakat desa, dengan bingkai desentralisasi (otonomi) desa, demokratisasi desa, good governance desa dan capacity building pemerintahan desa. Negara dan pembangunan berbicara tentang peran negara dalam pembangunan dan pelayanan publik. Fokusnya adalah perubahan haluan pembangunan yang top down menuju bottom up, membuat pelayanan publik lebih berkualitas dan semakin dekat dengan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan. dalam perspektif pembangunan ini, disadari betapa penting kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial. Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Payne, 1997: 266 dalam buku "Modern Social Work Theory"). Sementara itu Ife (1995: 182 dalam buku "Community Development: Creating Community Alternatives-Vision, Analysis And Practice")

memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka.

Pada sisi yang lain Sutrisno (2000:185) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

Meskipun rumusan konsep pemberdayaan berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lainnya, tetapi pada intinya dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebagai upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaruan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat. dengan demikian mereka diharapkan mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depan mereka, dimana provider dari pemerintah dan lembaga Non Government Organization/NGO hanya mengambil posisi partisipan, stimulan, dan motivator.

Konsep pemberdayaan sebagai suatu konsep alternatif pembangunan, yang pada intinya memberikan tekanan otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, sebab "civil society" akan merasa siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Namun, Friedmann (1992) juga mengingatkan bahwa adalah sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur-struktur diluar "civil society" diabaikan. oleh karena itu pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja namun juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar baik secara nasional maupun internasional. Konsep pemberdayaan merupakan hasil kerja dari proses interaktif baik ditingkat ideologis maupun praksis. Pada tingkat ideologis, konsep

pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top down dan bottom up antara growth strategy dan people centered strategy. Sedangkan ditingkat praksis, interaktif akan terjadi lewat pertarungan antarotonomi. konsep pemberdayaan sekaligus mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagian besar diakibatkan oleh kesenjangan terhadap akses modal, prasarana, informasi pengetahuan, teknologi ketrampilan, ditambah oleh kemampuan sumber daya manusia, serta kegiatan ekonomi lokal yang tidak kompetitif menunjang pendapatan masyarakat, serta masalah akumulasi modal.

Selain itu kelembagaan pembangunan yang ada pada masyarakat lokal secara umum belum dioptimalkan untuk menyalurkan dan mengakomodasikan kepentingan, kebutuhan dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas yang mampu memberi nilai tambah usaha.

Sementara melihat kelembagaan aparat pemerintah ditingkat lokal terlalu terbebani pelaksanaan program dari pemerintahan ditingkat atasnya, sehingga tidak dapat memfokuskan pada pelayanan pengembangan peran serta masyarakat dalam proses perwujudan masyarakat maju dan mandiri.

Menurut Kartasasmita (1996) yang mengacu pada pendapat Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menerangkan nilai-nilai sosial. konsep ini mencerminkan paradigma basis pembangunan yang bersifat people centered, participatory, empowering dan sustainable. Dari definisi diatas, pemberdayaan masyarakat dimengerti sebagai konsep yang lebih luas daripada hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar manusia. pemberdayaan masyarakat lebih diartikan sebagai upaya menjadikan manusia sebagai sumber, pelaku dan yang menikmati hasil pembangunan. Dengan kata lain pembangunan dari, oleh dan untuk masyarakat Indonesia.

Secara konkrit, pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui pembangunan ekonomi rakyat (Sumodiningrat, 1997). Sementara itu, pembangunan ekonomi rakyat harus diawali dengan usaha pengentasan penduduk dari kemiskinan.

Kemudian Sumodiningrat, mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut diatas paling tidak harus mencakup lima hal pokok yaitu bantuan dana sebagai modal usaha, pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan, penyediaan sarana, pelatihan bagi aparat dan masyarakat dan penguatan

kelembagaan sosial ekonomi masyarakat seperti bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang suatu saat harus digantikan dengan tabungan yang dihimpun dari surplus usaha.

Latar belakang tersebut secara nyata diwujudkan dalam pendekatan pembangunan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Pengoptimalan pengembangan masyarakat desa/kelurahan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk dapat meraih kesempatan peluang usaha melalui penyediaan prasarana dan sarana modal sosial dimasyarakat.
- 2) Pemantapan kordinasi pembangunan melalui penciptaan keterkaitan antara institusi lokal yang ada dimasyarakat.
- 3) Mendasarkan pada partisipasi masyarakat yang diiringi dengan peningkatan kemitraan dunia usaha, pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dan transparansi.

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Ada beberapa pendekatan yang perlu dipergunakan dalam pendidikan non formal yang menekankan pada proses pemberdayaan antara lain yang dikemukakan oleh S. Kindervatter dalam Kusnadi (2007: 222) terdiri atas:

- 1) *Community organization*, yaitu karakteristik yang mengarah pada tujuan untuk mengaktifkan masyarakat dalam usaha meningkatkan dan mengubah keadaan sosial ekonomi mereka. Hal yang perlu diperhatikan antara lain; (a). Peranan partisipasi ikut terlibat dalam kepemimpinan atau tugas kelompok; (b) peranan tutor hanya sebagai perantara, pembimbing dan motivator serta fasilitator; (c) metode dan proses mengutamakan metode pemecahan masalah, mengorganisasi masyarakat sebagai kekuatan dasar
- 2) *Participatory approaches*, yaitu pendekatan yang menekankan pada keterlibatan setiap anggota dalam seluruh kegiatan, perlunya melibatkan para pemimpin, tokoh masyarakat serta tenaga-tenaga ahli setempat
- 3) *Education for justice*, yaitu pendekatan yang menekankan pada terciptanya situasi yang memungkinkan warga masyarakat tumbuh dan berkembang analisisnya serta memiliki motivasi untuk ikut berperan serta.

b. Kesejahteraan Masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berbicara tentang kesejahteraan masyarakat dan negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita akan bertemu dengan berbagai teori pembangunan yang lahir pada abad 18 atau 19

dimana pada masa itu, setiap negara berusaha bangkit dari keterpurukan secara ekonomi atau keterpurukan politik akibat dari tingginya angka korupsi, dan hukum tidak lagi mampu menjadi tameng bagi pembangunan masyarakat di masa yang akan datang. Selain itu, tumbuhnya perindustrian sebagai salah satu penopang kehidupan masyarakat kala itu menjadi bagian utama pendorong munculnya pandangan-pandangan baru tentang kualitas kehidupan masyarakat. Berbagai ideologi tumbuh dan berkembang subur untuk menjawab kegelisahan masyarakat ketika menghadapi permasalahan sosial yang sebelumnya belum pernah mereka hadapi. Meningkatnya pengangguran, karena berkurangnya kebutuhan tenaga kerja sebagai akibat dari adanya modernisasi perangkat kerja perusahaan manufaktur di Eropa kala itu, menggiring berbagai permasalahan sosial lain yang muncul sebagai dampak turunan dari lahirnya revolusi Industri di Inggris dan berdampak pada lahirnya revolusi Perancis, dan secara kontinyu mendorong lahirnya revolusi Amerika. Bahkan pada era setelah perang Dunia II berakhir, perkembangan teori pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berkembang demikian pesat. Manusia berupaya menjawab kegelisahan yang selama ini mengganggu, terkait dengan kualitas kehidupan masyarakat di dunia.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat pada masa itu, lahirlah istilah *welfare state*, yang muncul untuk menjawab kebutuhan masyarakat tentang pertanyaan bagaimana membangun sebuah negara yang mampu memberikan layanan kepada rakyatnya dan memberikan kesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan oleh setiap warga negara. Negara bukan hanya alat kekuasaan dan memutuskan untuk melakukan peperangan dengan bangsa lain, tetapi lebih pada bagaimana negara bisa menjamin kehidupan dan hak hidup warga masyarakatnya untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Kita perlu mengkaji tentang pengertian *welfare state*, *Welfarestate* atau negara kesejahteraan Secara umum definisinya adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu: Demokrasi (*Democracy*). Penegakan Hukum (*Rule of Law*), perlindungan Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan anti diskriminasi.

Ide mengenai sistem kesejahteraan negara yang berkembang di Indonesia biasanya lebih sering bernuansa negatif ketimbang positif. Misalnya, sering kita dengar bahwa sistem kesejahteraan negara

adalah pendekatan yang boros, tidak kompatibel dengan pembangunan ekonomi, dan menimbulkan ketergantungan pada penerimanya (beneficiaries). Akibatnya, tidak sedikit yang beranggapan bahwa sistem ini telah menemui ajalnya, alias sudah tidak dipraktekan lagi di negara manapun. Meskipun anggapan ini jarang disertai argumen dan riset yang memadai. banyak orang menjadi kurang berminat membicarakan, dan apalagi, memperhitungkan pendekatan ini.

Berbicara mengenai bagaimana kesejahteraan berdampak terhadap keutuhan sebuah negara, maka kita dapat mempertimbangkan beberapa konsep dasar dari welfare state itu sendiri, diantaranya adalah Merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), Suharto, (2005a), dan Suharto (2006), pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna:

1) Sebagai kondisi sejahtera (well-being). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

2) Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (social security), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (personal social services).

3) Sebagai tunjangan sosial, khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima welfare adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai sumbangan.

4) Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian ke dua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga). Pengertian tentang kesejahteraan negara tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan

di atas. Secara substansial, kesejahteraan negara mencakup pengertian kesejahteraan yang pertama, kedua, dan keempat, dan ingin menghapus citra negatif pada pengertian yang ketiga. Dalam garis besar, kesejahteraan negara menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

Di Inggris, konsep welfare state difahami sebagai alternatif terhadap the Poor Law yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin (Suharto, 1997; Spicker, 2002). Berbeda dengan sistem dalam the Poor Law, kesejahteraan negara difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (right of citizenship), di satu pihak, dan kewajiban negara (state obligation), di pihak lain. Kesejahteraan negara ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk, orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (well being) warga negara secara adil dan berkelanjutan.

Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (social policy) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets).

Pembahasan

Berbicara mengenai *life quality*, maka akan berhubungan dengan standar-standar utama mutu kehidupan manusia yang harus dijadikan sebagai acuan. Karena, bila tidak akan memungkinkan untuk terjadinya bias dalam menentukan kerangka pokok kualitas kehidupan itu sendiri, karena kualitas adalah sebuah ukuran yang dalam satu konteks bisa difahami, namun bukan dalam kerangka universal, sehingga membutuhkan ukuran untuk mengkuantifikasikannya. Inilah yang menjadi bagian utama dalam membangun dan mengembangkan sistem pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Secara umum, bila kita mengacu pada standar kehidupan layak menurut Menteri Tenaga Kerja, meliputi kebutuhan sebagai berikut:

1) Makanan & Minuman

- 2) Sandang
- 3) Perumahan
- 4) Pendidikan
- 5) Kesehatan
- 6) Transportasi
- 7) Rekreasi dan Tabungan

Kebutuhan tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan minimal dari standar layak kehidupan yang dibutuhkan bagi tenaga kerja Indonesia secara umum, dengan demikian diharapkan tenaga kerja dapat hidup secara layak sesuai dengan standar kemanusiaan. Ini bisa menjadi salah satu tolok ukur kehidupan layak yang diharapkan bagi masyarakat Indonesia secara umum, walaupun kebutuhan pada kuantitasnya akan berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Masyarakat pedesaan, walaupun dalam beberapa hal masih memiliki karakter tertentu, namun dalam prinsip dasarnya masih memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia lainnya, inilah yang menjadi dasar bahwa masyarakat pedesaan pun memiliki standar kehidupan layak yang sama dengan masyarakat di daerah lainnya, termasuk di daerah perkotaan sekalipun.

Untuk memahami masalah kehidupan masyarakat pedesaan, maka perlu untuk kita kaji mengenai bagaimana pola-pola kehidupan masyarakat di sekitar pedesaan. Yang dimaksud dengan desa menurut Sutardjo Kartohadikusuma (1976) adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri.

Menurut R. Bintarto (1977), desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di situ (suatu daerah) dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal-balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut Paul H. Landis (1948; 12-13) desa adalah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Dengan ciri-cirinya sebagai berikut:

- a) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
- b) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
- c) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam seperti: iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat yang hakikatnya, bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat di mana

hidup dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai anggota masyarakat yang saling mencintai saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat.

Adapun yang menjadi ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain sebagai berikut :

- a) Di dalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas-batas wilayahnya;
- b) Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan (*Gemeinschaft* atau paguyuban).
- c) Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sambilan (*part time*) yang biasanya sebagai pengisi waktu luang.
- d) Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencarian, agama, adat-istiadat dan sebagainya.

Oleh karena anggota masyarakat mempunyai kepentingan pokok yang hampir sama, maka mereka selalu bekerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Seperti pada waktu mendirikan rumah, upacara pesta perkawinan, memperbaiki jalan desa, membuat saluran air dan sebagainya, dalam hal-hal tersebut mereka akan selalu bekerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat sering diistilahkan dengan gotong royong dan tolong-menolong. Pekerjaan gotong-royong pada waktu sekarang lebih populer dengan istilah kerja bakti misalnya memperbaiki jalan, saluran air, menjaga keamanan desa (ronda malam) dan sebagainya. Sedang mengenai macamnya pekerjaan gotong-royong (kerja bakti) itu ada dua macam, yaitu:

- a) Kerja bersama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri (biasanya diistilahkan dari bawah).
- b) Kerjasama untuk pekerjaan-pekerjaan yang inisiatifnya tidak timbul dari masyarakat itu sendiri berasal dari luar (biasanya berasal dari atas).

Kerjasama jenis pertama biasanya, sungguh-sungguh dirasakan kegunaannya bagi mereka, sedang jenis kedua biasanya sering kurang dipahami kegunaannya. Pembangunan masyarakat pedesaan di Indonesia, sudah selayaknya memperhatikan karakter masing-masing desa tersebut, karena pada prinsip dasarnya karakter kehidupan masyarakat desa akan menjadi bagian penting dalam menentukan program

pembangunan itu sendiri. Konteks pembangunan dan karakter kehidupan masyarakat akan berdampak terhadap pandangan dan kesiapan masyarakat itu sendiri untuk menerima proses pembangunan.

Kelaikan sebuah program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa pun sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kesanggupan masyarakat untuk melanjutkan program tersebut secara berkelanjutan dan bertumpu pada kemampuan masyarakat itu sendiri. Secanggih apapun program yang dibangun, namun tanpa kesiapan masyarakat hanya akan menimbulkan permasalahan selanjutnya dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Misalnya pembangunan sekolah inpres yang dulu memang berhasil meningkatkan angka partisipasi kasar masyarakat dalam pendidikan, namun seiring dengan berkembangnya waktu, dan bertambahnya jumlah sekolah termasuk sekolah swasta, hal tersebut justru menimbulkan masalah lain, yaitu ketimpangan antara sekolah yang satu dengan sekolah lainnya. Bahkan adanya ketimpangan distribusi tenaga pendidik antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Ini menjadi masalah, karena dampak lanjutannya adalah tidak meratanya kualitas lulusan pendidikan itu sendiri. Selain itu, sebaran distribusi industri yang terpusat di daerah sub urban juga menjadi masalah tersendiri, karena pada prinsip dasarnya pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat setempat hanya akan menjadi masalah lain dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Misalnya pengembangan Freeport di Papua yang tidak langsung menyentuh kehidupan masyarakat pedesaan disana, hanya akan menimbulkan kesenjangan yang tidak kunjung usai, terutama sebagai dampak dari terlalu banyaknya tenaga kerja asing di daerah tersebut dan dirasakan tak kunjung memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat sekitarnya.

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya adalah bahwa Indonesia merupakan Negara kesatuan yang memiliki kedaulatan, memiliki tujuan nasional dan berdiri secara utuh baik wilayahnya, rakyatnya ataupun pemerintahannya. Kedaulatan memiliki makna tidak hanya secara politis dan yuridis semata, namun secara sosiologis, ekologis dan ekonomis. Sehingga rakyat memiliki kemampuan untuk mengembangkan serangkaian kegiatan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan demokrasi. Kekuatan perekonomian sebuah

bangsa tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk membangun sistem perekonomian, tetapi lebih jauh pada kemampuan untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sanggup mengolah dan mengaktualkan segala potensi yang dimiliki untuk mencapai kemakmuran secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan yang saling menghormati, menghargai dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Indonesia, telah memenuhi segala prasyarat untuk dijadikan sebuah dasar negara merdeka. Karena, secara *de jure* maupun *de facto*, Indonesia telah memiliki pengakuan tentang dasar kedaulatannya secara hukum dan politis. Tapi sisi kedaulatan harus dibangun sesuai dengan visi dan tujuan pembangunan itu sendiri sejak awal kemerdekaan Indonesia. Kebutuhan masyarakat pada kebutuhan pokok yang meliputi sandang, pangan dan papan harus menjadi prioritas utama pembangunan disamping program-program pembangunan lainnya. Pembangunan harus memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengaktualisasikan dirinya sebagaimana manusia lainnya, karena hak atas kehidupan yang layak tidak terbatas pada warga negara yang maju saja, tapi bagi semua warga negara di dunia.

Kemampuan Indonesia untuk membangun dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling menghormati dan berkeadilan masih bisa dikembangkan, selama semua pihak sanggup untuk memberikan kontribusi sekecil apapun untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Kontribusi golongan yang mampu terhadap golongan yang kurang mampu menjadi salah satu bentuk kontribusi positif untuk membangun Indonesia di masa yang akan datang. Kerangka keutuhan NKRI adalah kedaulatan yang harus dibangun berdasarkan kekuatan yang ada dari segenap bangsa Indonesia, beserta kesatuan ekologi yang ada. Keutuhan Indonesia tidak bisa dibangun hanya berdasarkan kekuatan politis dan yuridis semata, karena kebutuhan ekonomi juga sama mendesaknya dengan kebutuhan pembangunan demokrasi di Indonesia itu sendiri. Bahkan ada anekdot, 'demokrasi tidak bisa dibangun diatas perut keroncongan'. Ini hanya sekedar gambaran bahwa kebutuhan pokok jauh lebih mendesak dibandingkan dengan demokrasi itu sendiri. Masyarakat di pedesaan sangat mungkin tidak mengetahui siapa calon legislatif dan calon menteri di kabinet selanjutnya, tapi mereka akan mengenali bendera dan di negara mana harus berpijak selama kebutuhan hak hidup mampu dipenuhi oleh negara tempatnya hidup.

Kasus yang terjadi di Desa Aji Kuning, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, yang terletak di pulau Sebatik membuktikan bahwa kebutuhan mengenai demokrasi dan sebagainya hanya akan menjadi nomor dua, setelah kebutuhan pokok terpenuhi [3]. Mereka lebih memilih untuk bertransaksi di wilayah Malaysia, karena harga barang jauh lebih lengkap dan lebih murah, termasuk ketika mereka harus bertransaksi dan menjual hasil buminya. Inilah yang bagian penting dalam pembangunan desa di daerah 3T, ideologi bangsa dan sebagainya bisa luluh lantak bila harus berhadapan dengan kebutuhan dasar kelayakan hidup manusia itu sendiri.

Kerangka NKRI bisa dibangun, bila pemberdayaan dan pembangunan manusia sudah berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Inilah kunci utama membangun sistem demokrasi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Visi Indonesia Maju tahun 2045 hanya bisa diperoleh bila manusia Indonesia itu sendiri sanggup untuk berpartisipasi di dalam visi tersebut dan merasa menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI, bukan hanya dijadikan lumbung suara ketika pemilu dan dilupakan setelah mendapatkan dulangan suara untuk mendapatkan kursi.

Penutup

Pembangunan Indonesia membutuhkan biaya yang cukup besar, tapi biaya tersebut jauh lebih kecil daripada biaya untuk menyatukan kembali anak bangsa yang terpecah belah. Indonesia memiliki keragaman suku bangsa yang teramat besar, bahkan salah satu negara majemuk terbesar di dunia. Tak ada negara lain yang memiliki keragaman etnis seperti Indonesia. Keragaman itu sendiri bisa menjadi peluang dan kesempatan, tetapi pula bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, terutama bila ada kelompok bangsa yang merasa ditinggalkan sendirian di tengah kemajuan kelompok bangsa lainnya.

Pemberdayaan masyarakat pedesaan dirasakan demikian penting untuk membangun kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan. Karena, masih banyak warga negara Indonesia yang hidup di daerah pedesaan, terutama yang termasuk dalam kategori daerah 3T (terpencil, tertinggal dan terdepan). Kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang layak adalah tuntutan yang paling penting, bagaimanapun masyarakat tersebut adalah anak bangsa yang memiliki hak yang sama untuk diperhatikan dan

diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Inilah kunci utama pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam kerangka NKRI, agar Indonesia tetap dibangun dalam pondasi kehidupan berbangsa yang sehat, adil, makmur dan merata bagi seluruh bangsa Indonesia.

Simpulan

- [1] Lihat antaranews.com. Jumat, 4 Oktober 2013. Tersedia: <http://www.antaranews.com/berita/398839/konsumsi-beras-masyarakat-indonesia-tertinggi-di-dunia>
- [2] BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2007 dan sebagainya: Diolah dari berbagai sumber
- [3] Lihat 'Indonesia Negaraku, Ringgit Uangku', Tersedia : <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0503/09/utama/1612105.htm>
- [4] Humas. 2012. Krimpying Yu Kas Mendapat PendampinganGMP. Tersedia: <http://www.purworejokab.go.id>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2012.
- [5] Kartasasmita, Ginanjar. 1995. Pemberdayaan Masyarakat. Kumpulan Materi Community Development: Pustaka Pribadi Alizar Isna.Msi.
- [6] Kusumo, Ayub T.S. 2010. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pulau-pulau Terluar dalam Rangka Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 3, tahun 2010
- [7] Martono, Nanang. 2011. Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial. Jakarta: Rajawali Press.
- [8] Pranaka, A.M.W., dan Onny S. Prijono, (eds.). 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS.
- [9] Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. Pembangunan: Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [10] Wijaya, Mahendra. 2010. Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Journal of Rural and Development FISIP Universitas Sebelas Maret diakses pada tanggal 27 Oktober 2012.
- [11] Sartori, Giovanni. 1997. Comparative Constitutional Engineering: An Enquiry into Structures, Incentives, and Outcomes (Second edition), N.Y.: New York University Press.
- [12] Sirait, Midian, dkk. 1997. Membangun Masyarakat Pancasila: Dinamika dan Dilemanya, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.